PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT BRIGUNA PURNA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNIT NGRAMBE KANTOR CABANG NGAWI

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma 3

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Oleh :

KHARISMA TUNGGAL DEWI

NIM : 2018110547

UNIVERSITA HAYAM WURUK PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama	: Kharisma Tunggal Dewi
Tempat, Tanggal Lahir	: Madiun, 20 Juni 2000
NIM	: 2018110547
Program Studi	: Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan	: Diploma 3
J u d u l	: Prosedur Pemberian Kredit BRIGUNA Purna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Diploma 3	Dosen Pembimbing
Tanggal : 24 Agustus 2021	Tanggal : 24 Agustus 2021
(Dr.Kautsar Riza Salman, SE.,MSA.Ak)	**(Kartika Marta Budiana, S.S.,M.Pd)**
NIDN: 0726117702	**NIDN: 0713038801**

GIVING PROCEDURE CREDIT BRIGUNA PURNA AT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNIT NGRAMBE NGAWI BRANCH OFFICE

KHARISMA TUNGGAL DEWI

2018110547

Email ; 2018110547@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

Credit is a financing provided by the bank to other parties in need which will then be returned gradually in accordance with a predetermined period of time. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ngrambe Unit Ngawi Branch Office is one of the state-owned enterprises that provides unsecured loans to retirees called Kedit Briguna Purna. This final project research aims to find out how the procedure for providing Full Briguna Credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Ngawi Branch Office. This final project research uses descriptive methods, interviews and documentation. The criteria for prospective debtors are retirees who pay pension salaries through PT. Bank Rakyat Indonesia. In the process of granting BRIGUNA Purna loans, namely Credit Applications submitted by customers, BRIGUNA Purna Credit Analysis, BRIGUNA Purna Credit Decisions, Credit Realizations, and Credit Documentation. with the requirements and the costs have been paid by the debtor, either in cash or overbooking. Obstacles that exist during the process of granting BRIGUNA Credit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Ngawi Branch Office, namely Pension salaries that are not through the payroll of Bank Rakyat Indonesia (BRI). The solution to overcome these obstacles is the PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Ngawi Branch Office by way of the bank or customer having to take care of the transfer of payment of pension salary accounts from other banks to BRI bank.

Keyword : *Credit, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Procedur for giving Briguna Purna, Briguna Retired Credit Barriers, and Solution*

LATAR BELAKANG

Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau hasil. Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, tentang kredit yaitu kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah dengan pemberian bunga (Kasmir 2016:73)

Berdasarkan hasil riset di Aging Asia yang dikeluarkan Manulife Asset Management bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap remeh tingkat pengeluaran yang akan mereka butuhkan di masa pensiun. Riset ini menganalisis pola pengeluaran di masa pensiun pada enam negara yang berada di wilayah Asia dan membandingkannya dengan hasil survei mengenai perkiraan tingkat pengeluaran di masa pensiun pada negara-negara tersebut. Hasil riset menunjukkan masyarakat Indonesia memperkirakan tingkat pengeluaran mereka di masa pensiun akan turun menjadi 68% dibanding masa sebelum pensiun.

Hal ini menegaskan pentingnya mengalokasikan kekayaan secara efisien agar kebutuhan-kebutuhan di masa pensiun dapat terpenuhi. Namun demikian, hasil riset mengungkapkan bahwa tampaknya masyarakat meremehkan tingkat simpanan yang dibutuhkan untuk menopang pengeluaran di masa pensiun Adapun pengeluaran untuk pendidikan, transportasi, dan komunikasi menurun, pengeluaran yang terkait dengan perumahan, kesehatan, makanan dan minuman justru meningkat, dalam beberapa kasus porsi peningkatannya melebihi porsi penurunan yang terjadi pada kategori lainnya.

Hal ini mencerminkan tantangan bagi para investor di Indonesia. Laporan ini juga menyoroti pentingnya memastikan seluruh potensi sumber pendapatan di masa pensiun telah dikerahkan dengan efisien, termasuk gaji dan upah, jaminan sosial dari pemerintah, dana pensiun, dukungan keluarga, dan pendapatan yang berasal dari kekayaan rumah tangga. (Bisnis.com,JAKARTA)

Melonjaknya kebutuhan kehidupan sehari-hari, pastinya masing-masing individu memerlukan dana dengan tujuan yang berbeda. Beberapa diantaranya menggunakan untuk biaya rumah, kendaraan pribadi, serta keperluan pendidikan. Kemampuan finansial setiap orang pun juga berbeda-beda sehingga memerlukan dana secara mendadak. Dengan hal tersebut, Bank Rakyat Indonesia menyediakan fasilitas kredit untuk memberikan solusi serta kemudahan dalam berbagai kebutuhan yang telah memasuki usia purna bakti.

Kredit BRIGUNA Purna (Pensiun) adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (uang pensiun). Dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif, misalnya : pembelian barang bergerak atau tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah atau sekolah anak, pengobatan, pernikahan anak, dan lain-lain. Kredit BRIGUNA Purna yang diberikan kepada para pensiunan atau jandanya baik sipil, militer, BUMN, yang menerima uang pensiunan secara tetap setiap bulannya yang ditawarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Keuntungan dari kredit BRIguna Purna yaitu proses

pengajuan pinjaman yang cepat dengan prosedur dan persyaratan mudah, bunga dan biaya rendah, cicilan ringan, limit kredit tidak terbatas, tidak ada kewajiban pengendapan dana, promo dan program menarik, perlindungan asuransi jiwa tanpa *medical check up*, apabila debitur meninggal dunia pinjaman akan dicover asuransi.

Untuk itu penulis tertarik mengangkat judul Tugas Akhir ini yaitu "Prosedur Pemberian Kredit BRIGUNA Purna Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi" penulis berharap dapat banyak mempelajari mengenai Kredit BRIGUNA Purna dan mendaptkan manfaat yang besar berupa ilmu pengetahuan khususnya mengenai dunia perbankan serta dapat mempelajari proses menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pemberian Kredit BRIGUNA Purna di Bank BRI Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian Kredit BRIGUNA Purna di Bank BRI Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi.
3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada saat proses pemberian Kredit BRIGUNA Purna di Bank BRI Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi.
4. Untuk mengetahui solusi meminimalisir hambatan yang terjadi pada proses pemberian Kredit BRIGUNA Purna di Bank BRI Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat peneliatian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
   Penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai bahan pembanding dan atau bahan referensi untuk penelitian sejenisnya. Dan selain itu juga diharapkan sebagai sumber informasi akademik yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan pemberian kredit Briguna Purna di Bank Rakyat Indonesia (BRI).
2. Bagi Peneliti
   Penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai sarana menambah, mengkaji, dan membandingkan ilmu yang diberikan pada saat di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya dalam dunia kerja, khususnya pada dunia kerja perbankan.
3. Bagi Perusahaan (Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi.
   Penelitian ini bisa memberikan masukan dan

juga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dalam pemberian kredit Briguna Purna di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi. .

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini disampaikan mengenai rancangan penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan Tugas Akhir. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif yaitu menggunakan sumber data primer yang didapat dari pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Alasan penulis menggunakan metode ini agar mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit BRIguna Purna di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah atu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895. Tahun 1895 sebagai era pembentukan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjatmaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp En Spaarbank Der Inlandsche Hoofden.

Pada tahun 1946 yang juga menjadi periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat berhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Tahun 1960 sebagai era penggabungan dari BRI,BKTN, & NHM **,** pada waktu itu melalui PERPU No.41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM), kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (PenPres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar PENPRES No.17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia urusan koperasi Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Pada tahun 1992, Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas.

Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menjual 305 saham Bank ini, sehingga menjadi perusahaan public dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini. *Sumber : website Bank rakyat Indonesia (BRI)*https://bri.co.id/infoperusahanDiakses tanggal 25 April 2021.

Hasil Penelitian

Berikut adalah alur prosedur pemberian Kredit BRIGUNA Purna PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi :

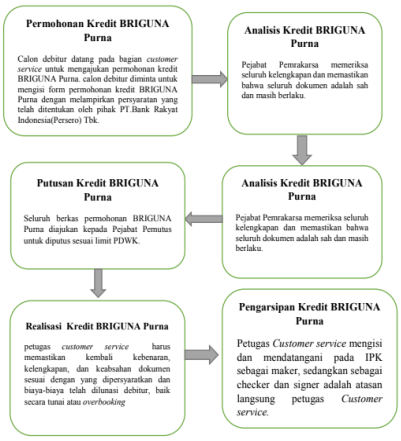

Gambar 4.1

Alur Prosedur Pemberian Kredit BRIGUNA Purna di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah disusun, maka dapat diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut :

Syarat dan Ketentuan Kredit BRIGUNA Purna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi

Berikut adalah syarat dalam kredit BRIGUNA Purna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi :

1. **Syarat Kredit BRIGUNA Purna**

   Dalam pemberian kredit BRIGUNA Purna calon debitur harus mememuhi syarat sebagai berikut :

   a. Pensiunan dan atau janda atau dudanya
      1) Asli Surat Keterangan Pensiun
      2) Daftar pembayaran pensiun (Dapem)
      3) Kartu registrasi induk pension (KARIP)
      4) Buku pensiun
   b. Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pension, maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.
   c. Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan dari instanis yang bersangkutan.
   d. BRIGUNA Purna harus lunas selambat-lambatnya

pada saat debitur berulang tahun ke-75 tahun.

e. Calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA Purna, dengan dilampiri :
   i. Dokumen pensiun, meliputi :
      a) Asli SK pensiun
      b) Daftar pembayaran pensiun (Dapem)
      c) Foto copy KARIP
      d) Buku pensiun :

      Untuk pensiun yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun, maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.

      1) Foto copy identitas diri (suami atau istri)
      2) Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
      3) Foto copy Kartu Keluarga
      4) Surat pernyataan debitur diatas materai cukup
      5) Surat kuasa potong uang pensiun atau SKPUP bermaterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI
      6) Surat kuasa pendebetan rekening
      7) Foto copy buku tabungan BRI, bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu.
      8) Surat kuasa memotong uang pinjaman, apabila provisi, biaya administrasi dan atau premi asuransi dipotong dari pinjaman yang direalisasikan.

2. Ketentuan Kredit BRIGUNA Purna

Dalam pemberian kredit BRIGUNA Purna memiliki ketentuan sebagai berikut :

A. Bentuk Kredit

   Bentuk kredit adalah persekot annuitas dengan pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan. Perhitungan bunga annuitas berlaku untuk debitur baru dan debitur *eksisting* yang akan mengajukan suplesi kredit. Terhadap debitur *eksisting* yang telah menerima BRIGUNA Purna sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, tetap menggunakan suku bunga flat sampai dengan kreditnya jatuh tempo atau lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

B. Jangka Waktu Kredit

   Maksimal 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan untuk Pensiunan, BRIGUNA Purna harus sudah lunas selambat-lambatnya pada

saat debitur berulang tahun yang ke-75.

C. Suku Bunga
Ketentuan suku bunga mengacu pada suku bunga yang ditetapkan ALCO dalam surat tersendiri.

D. Denda atau Penalty

Denda = Tunggakan (pokok + bunga) x 50% x suku bunga yang berlaku

E. Provisi dan Biaya Administrasi
Biaya provisi dan administrasi harus dibayar lunas oleh debitur pada saat pencairan kredit. Pembayaran biaya tersebut dapat dilakukan dengan cara :

1) Tunai maupun *overbooking* dari dana debitur yang bersangkutan, sebesar :

Biaya Administrasi Minimal	Provisi Minimal
Rp 100.000,-	1% dari plafond

F. Bea Materai
Bea materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi beban debitur.

3. Jaminan Kredit BRIGUNA Purna PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Hal demikian sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Adapun jaminan atau agunan Kredit BRIGUNA Purna pada PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi sebagai berikut :

1) Agunan Pokok
Gaji atau uang pensiun debitur yang bersangkutan. (SK asli pengangkatan pertama dan SK kenaikan pangkat terakhir, serta SK pensiun dan KARIP).

2) Agunan Tambahan
Jenis agunan tambahan dan pelaksanaannya (termasuk pengikatanya) sepenuhnya diserahkan kepada pejabat pemutus dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

3) Khusus untuk debitur pegawai negeri yang gajinya tidak dibayarkan melalui BRI dan pegawai perusahaan swasta dengan plafond lebih dari RP.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun, agar dipertimbangkan mitigasi risiko lainnya seperti agunan tambahan.

Prosedur Pemberian atau Pelayanan BRIGUNA Purna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi

Berikut adalah prosedur dalam kredit BRIGUNA Purna di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi :

1. **Permohonan BRIGUNA Purna**
   a. Pengajuan awal fasilitas BRIGUNA Purna oleh instansi atau perusahaan, dilakukan secara kolektif minimal 5 (lima) calon debitur atau perorangan bank akan tetap melayani. Meski demikian, Pinca diberikan kewenangan untuk melayani permohonan fasilitas BRIGUNA Purna dengan mempertimbangkan efesiensi pelayanan dan kemungkinan pengembangan BRIGUNA Purna dimasa yang akan datang.
   b. Kanca atau KCP atau BRI unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA Purna kepada instansi atau debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA Purna dari unit kerja BRI (Kanca atau KCP atau BRI Unit) lainnya.
   c. Dalam hal instansi atau perusahaan terdapat di berbagai daerah seperti POLRI, TNI, Dinas Pendidikan, Telkom, dan Instansi sejenis lainnya. Maka instansi atau perusahaan tersebut dapat dilayani oleh lebih dari satu unit kerja BRI berbeda, namun pada satu lokasi instansi atau perusahaan tersebut hanya dapat dilayani oleh satu unit kerja BRI.
   d. Calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA Purna, dengan dilampiri :
      Dokumen pensiun, meliputi :
      a. Asli SK pensiun
      b. Daftar pembayaran pensiun (Dapem)
      c. Foto copy KARIP
      d. Buku pensiun :

         Untuk pensiun yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun, maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.

      e. Foto copy identitas diri (suami atau istri)
      f. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
      g. Foto copy Kartu Keluarga
      h. Surat pernyataan debitur diatas materai cukup
      i. Surat kuasa potong uang pensiun atau SKPUP bermaterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI
      j. Surat kuasa pendebetan rekening
      k. Foto copy buku tabungan BRI, bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu.
      l. Surat kuasa memotong uang pinjaman, apabila provisi, biaya administrasi dan atau

premi asuransi dipotong dari pinjaman yang direalisasikan.

2. **Analisis dan Putusan Kredit**
   a. Setelah seluruh persyaratan permohonan BRIGUNA Purna dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.
   b. Pejabat kredit ini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau perusahaan yang bersangkutan.
   c. Pejabat Pemrakarsa kemudian menghitung jumlah BRIGUNA Purna yang bisa diberikan dengan menggunakan rumus dan menuangkannya dalam Form Analisis dan Putusan BRIGUNA Purna, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan *Credit Risk Scoring* (CRS).
   d. Seluruh berkas permohonan BRIGUNA Purna diajukan kepada Pejabat Pemutus untuk diputus sesuai limit PDWK.

3. **Realisasi dan Pengarsipan Pemberian Kredit BRIGUNA PURNA**
   1) Pada saat kredit akan direalisasi, petugas *customer service* harus memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya-biaya telah dilunasi debitur, baik secara tunai atau *overbooking.*
   2) Sebelum realisasi, perludiperhatikan syarat-syarat realisasi dengan melengkapi berkas kredit sebagai berikut :
      a. Kuitansi pencairan
      b. Foto copy KTP atau tenda pengenal lainnya yang masih berlaku.
      c. Foto copy Kartu Keluarga
      d. Formulir permohonan BRIGUNA Purna.
      e. Form *Credit Risk Scoring* (CRS)
      f. Form analisis dan putusan BRIGUNA Purna (untuk suplesi, form analisis dan putusan BRIGUNA Purna disatukan dengan form analisis dan putusan BRIGUNA Purna sebelumnya).
      g. Instruksi pencairan kredit (IPK), kecuali untuk BRI Unit.
      h. Surat pengakuan hutang model SH-03 berikut model SU. Apabila debitur yang bersangkutan mendapat suplesi kredit, maka addendum atas suplesi kreditnya disatukan dengan SPH kredit sebelumnya.
      i. Untuk debitur pegawai aktif, asli surat keputusan (SK)

pengangkatan pegawai tetap, asli SK kenaikan pangkat terakhir dan atau persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pejabat pemutus.

j. Untuk pensiunan, dokumen pensiun disesuaikan dengan ketentuan perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun debitur yang bersangkutan.

k. Daftar perincian gaji atau upah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

l. Surat pernyataan kesanggupan yang berhutang atau debitur diatas materai cukup yang berisi kesanggupan debitur melunasi seluruh sisa pinjaman.

m. Surat pernyatan kesanggupan pemotong gaji atau uang pensiun yang ditunjuk dalam hal hal gaji atau uang pensiun dibayarkan tidak melalui BRI. Untuk debitur PNS yang mekanisme pembayaran langsung melalui rekening simpanan di BRI.

n. Surat rekomendasi atasan atau pimpanan instansi atau perusahaan yang bersangkutan.

o. Surat kuasa potong gaji (SKPG) atau surat kuasa potong uang pensiun (SKPUP) atau surat kuasa debet rekening, dalam hal uang pensiun dibayarkan melalui BRI.

p. Surat kuasa memotong uang pinjaman, dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan premi administrasi dan premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan

q. Apabila dokumen sudah diyakini kebenaran, kelengkapan dan keabsahannya, maka petugas *Customer service* mengisi dan mendatangani pada IPK sebagai maker, sedangkan sebagai *checker* dan *signer* adalah atasan langsung petugas *Customer service*.

r. Mekanisme pembukuan pencairan BRIGUNA Purna yang biaya-biayanya (provisi, administrasi, dan atau premi asuransi) dipotong dari pinjaman yang akan direalisasikan.

Hambatan dalam Pemberian Kredit BRIGUNA Purna di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi

Berikut hambatan dalam prosedur pemberian kredit BRIGUNA PURNA di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi yaitu Gaji pensiun yang tidak melalui *payroll* Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selama pemberian Kredit BRIGUNA Purna ada beberapa calon debitur yang gaji pensiun tidak melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam hal ini calon debitur harus ada surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya dari debitur kepada pemotong gaji atau uang pensiun yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan gaji atau uang pinjaman dan fasilitas kredit debitur di perusahaan atau instansi yang bersangkutan.

Solusi untuk mengurangi hambatan yang terjadi pada proses pemberian Kredit BRIGUNA Purna di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi

Berikut solusi untuk mengurangi atas hambatan gaji pensiun yang tidak melalui *Payroll* Bank Rakyat Indonesia (Taspen,ASABRI) dalam prosedur pemberian Kredit BRIGUNA Purna di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi yaitu pihak bank atau nasabah harus mengurus perpindahan pembayaran rekening gaji pensiun dari bank lain ke bank BRI.

Setelah dilakukan pemindahan pembayaran gaji baru bisa diberikan pinjaman di BRI. Proses pengalihan rekening gaji memerlukan waktu 3 bulan. Meskipun demikian, pihak bank BRI dapat melakukan pencairan pinjaman kredit BRIGUNA Purna pada bulan tersebut. Setelah mendapatkan surat resmi dari pihak Taspen atau ASABRI pihak BRI baru bisa memberikan pinjaman BRIGUNA Purna dengan catatan melakuukan pemblokiran pembayaran gaji pensiun selama 3 bulan.

PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari Simpulan, Saran, dan Implikasi Penelitian. Kesimpulan disusun berdasar tujuan penelitian serta hasil penelitian yang telah penulis peroleh Saran dan Implikasi dari penelitian yang ditujukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi yang dijadikan oleh penulis sebagai objek untuk melakukan penelitian.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa dapat. disimpulkan Prosedur Pemberian Kredit BRIGUNA Purna di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Pensiun
2. Daftar pembayaran pension (Dapem)
3. Kartu registrasi induk pension (KARIP)
4. Buku pensiun

5. Foto copy identitas diri (suami atau istri)
6. Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
7. Foto copy Kartu Keluarga
8. Untuk pensiunan yang menerima uang pension dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun.
9. Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan dari instanis yang bersangkutan.
10. BRIGUNA Purna harus lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun ke-75 tahun.
11. Surat pernyataan debitur diatas materai cukup
12. Surat kuasa potong uang pensiun atau SKPUP bermaterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI
13. Surat kuasa pendebetan rekening
14. Foto copy buku tabungan BRI
15. Surat kuasa memotong uang pinjaman

Prosedur Pemberian Kredit BRIGUNA Purna di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Permohonan Kredit BRIGUNA PURNA
2. Analisis Kredit BRIGUNA PURNA
3. Putusan Kredit BRIGUNA PURNA
4. Realisasi Kredit BRIGUNA PURNA
5. Pengarsipan Pemberian Kredit BRIGUNA PURNA

Hambatan yang ada pada saat proses pemberian Kredit BRIGUNA Purna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi dapat disimpulkan yaitu Gaji pensiun yang tidak melalui *payroll* Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Solusi untuk mengurangi hambatan yang muncul pada saat proses pemberian Kredit BRIGUNA Purna di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi yaitu pihak bank atau nasabah harus mengurus perpindahan pembayaran rekening gaji pensiun dari bank lain ke bank BRI. Setelah dilakukan pemindahan pembayaran gaji baru bisa diberikan pinjaman di BRI. Proses pengalihan rekening gaji memerlukan waktu 3 bulan.

Meskipun demikian, pihak bank BRI dapat melakukan pencairan pinjaman kredit BRIGUNA Purna pada bulan tersebut. Setelah mendapatkan surat resmi dari pihak PT.Taspen atau ASABRI pihak BRI baru bisa memberikan pinjaman BRIGUNA Purna dengan catatan melakuukan pemblokiran pembayaran gaji pensiun selama 3 bulan.

Saran

Saran penelitian ini diberikan kepada peneliti selanjutnya, yaitu : Apabila peneliti selanjutnya mengambil objek penelitian yang sama yaitu di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi agar mengambil judul atau topic yang berbeda dengan mencari referensi

agar lebih menarik dan tidak sama dengan tahun sebelumnya.

Implikasi

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan terdapat hambatan yang terjadi pada Prosedur Pemberian Kredit BRIGUNA Purna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi. Agar proses pemberian Kredit BRIGUNA Purna dapat berjalan dengan lancar dan untuk mengurangi hambatan yang muncul pada saat proses pemberian Kredit BRIGUNA Purna, adapun saran yang diberikan dari penulis yaitu :

1. Untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang menangani kredit Briguna Purna dapat Menjalin komunikasi yang berkelanjutan baik dengan debitur atau perusahaan yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui informasi terbaru dari calon debitur agar kedepannya tidak terjadi tunggakan pembayaran yang dapat mengakibatkan kredit macet.
2. Untuk Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngrambe Kantor Cabang Ngawi. Sebaiknya sebelum mengajukan Kredit BRIGUNA Purna, alangkah baiknya nasabah dapat mempersiapkan persyaratan terlebih dahulu. Agar pada proses pengajuan Kredit BRIGUNA Purna tidak terhambat dan dapat berjalan dengan lancar.
3. Untuk Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Diharapkan untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap mahasiswa yang melaksanakan penelitian Tugas Akhir untuk kesiapan mental, materi, dan fisik. Pihak Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa agar penyusunan Tugas Akhir dapat terselesaikan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Pedoman Penulisan Dan Penilaian Tugas Akhir Diploma, 2021, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya.

BRI (27 Juni). *Ebook Reader Portlet CP*. Jakarta : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. (https://bri.co.id/documents/20123/56789/CP_Bank_BRI_27Juni.pdf) Diakses tanggal 25 April 2021.

BRI AR (2020). *Laporan Tahunan*. Jakarta : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. https://bri.co.id/documents/20123/12ef2a61-e8e9-7685-3d29e2cd28abe35d?download=trueDiakses tanggal 25 April 2021.

Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam (2000). *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*.Jakarta.

Diakses tanggal 28 Agustus 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d) Diakses tanggal 29 Maret 2021.

Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : PT.RAJAGRAFINDO PERSADA.

Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT.RAJAGRAFINDO PERSADA.

Kasmir.(2012).*Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : PT.RAJAGRAFINDO PERSADA.

Margareta,Shinta (2013). *Hubungan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Dengan Efektivitas Pengambilan Keputusan Pimpinan*. Jawa Barat : Universitas Pendidikan Indonesia. http://repository.upi.edu/1605/6/S_ADP_0705056_Chapter3.pdfDiakses tanggal 20 April 2021.

Riendy (2014). Bisnis.comJakarta. Jakarta.https://market.bisnis.com/read/20141015/92/265308/hasil-riset-pengeluaran-masa-pensiun-lebih-tinggi-dari-estimasi Diakses tanggal 29 Maret 2021

Rivai, Veithzal; Sofyan Basir; Sarwono Sudarto; Arifiandy Permata Veithzal. 2013. Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik, edisi 1, cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Sholicha (2016). *Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Kantor Cabang Waru Sidoarjo.* Surabaya : STIE Perbanas Surabaya.http://eprints.perbanas.ac.id/4597/ Diakses Tanggal 05 April 2021.

Surat Edaran Direksi BRI, NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015.Diakses tanggal 21 Mei 2021

THAMRIN, Abdullah; TANTRI, Francis,(2012), Bank dan lembaga keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 Tentang Kredit. Diakses tanggal 29 Maret 2021

Undang-Undang Perbankan atau UU No. 7 Tahun 1992 https://menuruthukum.com/2020/03/20/jaminan-kredit-perbankan/ Diakses tanggal 28 Agustus 2021

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 23 Tentang PerbankanDiakses tanggal 28 Agustus 2021

Website Bank Rakyat Indonesia (BRI) (https://bri.co.id/info-perusahaan) Diakses tanggal 25 April 2021

Widoyoko, (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Diakses tanggal 29 Maret 2021

Wulandari (2014). *Prosedur Pemberian Kredit Briguna Purna (Pensiun) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Kantor Cabang Dewi Sartika Bogor).* Bogor : Universitas Ibn Khaldun Bogor. http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=831524&val=13492&title=PROSEDUR%20PEMBERIAN%20KREDIT%20BRIGUNA%20PURNA%20(PENSIUN)%20PADA%20PT.%20BANK%20RAKYAT%20INDONESIA%20(PERSERO)%20TBK%20%20%20(KANTOR%20CABANG%20DEWI%20SARTIKA%20BOGOR) Diakses tanggal 05 April 2021